

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kekayaan suku, kepercayaan, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan aset Indonesia yang paling berharga. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang khas dan tiada tandingannya, yang membedakannya dengan negara-negara lain. Melalui keberagaman yang dimiliki negara Indonesia mengharuskan adanya sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, dengan adanya keberagaman ini juga membuat bangsa Indonesia dapat saling melengkapi satu sama lain.

Namun tak jarang juga dijumpai bahwa keberagaman menjadi ancaman bagi negara Indonesia sehingga menimbulkan perpecahan antarbangsa. Maka dari itu sikap toleransi merupakan aspek krusial untuk ada ditengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia. Karena dengan adanya sikap toleransi dapat berdampak pada adanya rasa saling menghargai, menghormati perbedaan, mencegah perpecahan antarmasyarakat, dan menjadi kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga terbentuklah hidup berdampingan dalam harmoni yang nyaman, aman, damai, dan saling melengkapi untuk dapat dinikmati bersama.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.). Dengan demikian, pendidikan merupakan upaya sadar untuk mempersiapkan peserta didik agar peran masa depan mereka dapat lebih baik melalui kegiatan bimbingan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan positif lainnya seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selain itu, pendidikan juga dapat dipahami sebagai tanggung jawab, bimbingan, dan pilihan yang ditetapkan sebagai sarana untuk pengembangan masa depan peserta didik di masa depan yang tidak terlepas dari kontrol seorang guru atau pendidik.

Dalam hal ini guru atau pendidik memiliki peran yang sangat kompleks. Guru adalah seorang yang mampu mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada orang lain melalui pembelajaran yang dilakukan sehingga peserta didik menjadi orang-orang yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas. Karena sejatinya guru adalah seseorang yang mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada dunia pendidikan baik di ranah pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (Indra, Sugiaryo, & Supeni, 2022).

Guru juga memiliki peran sebagai panutan bagi peserta didik. Sikap dan tindakan seorang guru akan sangat berpengaruh dalam membentuk sikap peserta didik. Jika guru menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan belajar mengajar, maka peserta didik cenderung meniru dan menginternalisasikan sikap tersebut.

Salah satu bidang studi yang memajukan pendidikan nilai, moral dan budaya bangsa Indonesia adalah bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebagai bidang studi yang mengajarkan pendidikan nilai, PPKn juga merupakan bidang studi yang berfokus pada pembentukan jati diri bangsa Indonesia, mulai dari dimensi keagamaan, sosiokultural, bahasa dan usia serta suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945 (Sukmawati & Kurniawaty, 2022). Sehingga guru PPKn mempunyai peran penting dan tanggung jawab yang lebih berat untuk membentuk moral, karakter dan sikap peserta didik.

Guru PPKn juga mempunyai peran yang sangat khusus dan strategis dalam mengembangkan kesadaran kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan membentuk karakter serta sikap yang baik pada peserta didik. Sementara itu, peran guru mata pelajaran lainnya biasanya lebih terfokus pada pembelajaran kurikulum mereka masing-masing tanpa penekanan khusus pada aspek kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut menjadikan guru PPKn menjadi *role model* bagi peserta didiknya untuk membentuk sikap yang baik, khususnya sikap toleransi. Guru PPKn dapat memanfaatkan contoh-contoh kehidupan nyata untuk mengajarkan pentingnya sikap toleransi, melalui

pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial dan budaya peserta didik, mereka akan lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai toleransi.

Namun kenyataannya masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh guru PPKn dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik, khususnya pada sikap toleransi. Seperti diungkapkan oleh Thomas Lickona, seorang pendidik karakter yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Karakter Amerika dan berafiliasi dengan Cortland University, sebuah negara berada di jurang kemerosotan ketika menunjukkan tanda perkembangan zaman. Tanda-tanda ini mencakup meningkatnya kekerasan remaja, budaya ketidakjujuran yang lazim, penanaman sikap ekstremis dalam kelompok teman sebaya, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan pendidik, meningkatnya ambiguitas moral, memburuknya standar bahasa, meningkatnya perilaku merusak diri sendiri seperti penggunaan narkoba, pelecehan dan pergaulan bebas, memudarnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, menurunnya etos kerja, dan suasana yang ditandai dengan rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian komunal (Sumatri & Alwizar, 2021). Masalah-masalah tersebut timbul karena kurangnya perhatian yang diberikan orangtua kepada anaknya, sehingga apa yang diungkapkan oleh Lickona tersebut dapat dengan mudah dijumpai dalam masyarakat di Indonesia saat ini.

Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua di rumah dan oleh guru di sekolah. Contoh kekerasan di kalangan remaja yang sangat sering terjadi yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini juga menjadi salah satu masalah yang terjadi di SMA Negeri 4 Binjai. Terlepas dari SMA Negeri 4 Binjai adalah salah satu sekolah

terbaik di Kota Binjai, sekolah yang memiliki akreditasi dan budaya sekolah yang sangat baik serta guru-guru yang professional, sekolah ini tidak dapat menghindari terjadinya tawuran antarpelajar yang terjadi dengan sekolah lain karena terjadi diluar jam sekolah. Tawuran di sekolah ini disebabkan karena adanya adu domba yang dilakukan peserta didik sehingga terjadilah perkelahian massal. Masalah ini juga akibat dari kurangnya sikap toleransi peserta didik dalam mentolerir sebuah masalah-masalah kecil. Dampak dari terjadinya tawuran antar pelajar yaitu mengakibatkan terjadinya perpecahan antar peserta didik dan menimbulkan sikap permusuhan. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan baik melalui cara mediasi yang dilakukan oleh antarpihak sekolah, kepolisian, dan keikutsertaan guru PPKn.

Masalah-masalah mengenai toleransi sebenarnya sangat melanggar hak individu sehingga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh menteri pendidikan Indonesia saat ini yaitu bapak Nadiem Makarim. Beliau menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) dosa besar pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Ketiga dosa besar pendidikan ini berdampak pada terhambatnya mewujudkan lingkungan belajar yang baik dan dapat memberikan trauma yang mendalam bagi seorang anak. Salah satunya adalah intoleransi, yang mana intoleransi adalah sebuah sikap atau rasa ketidakpedulian terhadap keberadaan orang lain.

Beberapa contoh lainnya mengenai kasus intoleransi di Indonesia khususnya yang terjadi di sekolah dikutip dari (Suyanto, 2021) <https://news.detik.com/kolom/d-5347202/benih-intoleransi-di-sekolah> terdapat

pemaparan berkaitan dengan benih intoleransi di sekolah. Contoh kasus yang diangkat seperti yang terjadi di Padang tepatnya di SMK Negeri 2 Padang, dalam kasus ini siswi yang beragama non-muslim dipaksa oleh guru untuk menggunakan hijab saat sekolah dengan alasan hijab sebagai aturan sekolah. Selain itu, kasus mengenai intoleransi juga terjadi di SMA Negeri 58 Jakarta pada November 2020, dalam kasus ini diberitakan bahwa terdapat oknum guru yang diduga melarang peserta didiknya memilih ketua OSIS yang non-muslim. Padahal sekolah-sekolah ini adalah sekolah negeri yang seharusnya dapat memberikan jaminan hak bagi setiap individunya. Sehingga hal ini menjadi kejadian yang sangat merisaukan bagi dunia pendidikan saat ini.

Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik dan pembimbing, guru PPKn mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan nilai dan moral pada peserta didik. Sehingga guru PPKn diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik profesional yang mampu membentuk karakter dan sikap peserta didik yang bertoleransi terhadap kehidupannya, dan bukan menjadi seseorang yang mengajarkan tindakan intoleransi kepada peserta didik. Sesuai dengan focus pendidikan yang dimiliki guru PPKn, maka sebagai guru diharapkan dapat menjadikan dirinya sebagai teladan atau contoh bagi peserta didiknya dalam berperilaku dilingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas mengenai Pengaruh Peran Guru PPKn Terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri 4 Binjai.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak berdampak pada terbentuknya sikap buruk seorang anak.
2. Sikap tidak toleransi (intoleransi) menjadi salah satu dosa besar dalam dunia pendidikan yang melanggar hak individu.
3. Terdapat guru yang mempraktekkan sikap dan perilaku intoleransi.
4. Tawuran antarpelajar menjadi salah satu masalah kekerasan remaja yang membentuk sikap buruk peserta didik.
5. Peran guru PPKn terhadap pembentukan sikap toleransi peserta didik.
6. Pengaruh peran guru PPKn terhadap pembentukan sikap toleransi peserta didik di SMA Negeri 4 Binjai.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan membatasi masalah agar tidak meluas kemana-mana dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memfokuskan hanya terkait pada pengaruh peran guru PPKn terhadap pembentukan sikap toleransi peserta didik di SMA Negeri 4 Binjai.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu bagaimana pengaruh peran guru PPKn terhadap pembentukan sikap toleransi peserta didik di SMA Negeri 4 Binjai?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peran guru PPKn terhadap pembentukan sikap toleransi peserta didik di SMA Negeri 4 Binjai.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan terdapat beberapa manfaat, antara lain:

1.6.1. Secara Teoritis

Dalam konteks teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang berharga bagi peneliti dan rekan siswa, sehingga mendorong penelitian lebih mendalam tentang Pengaruh Peran Guru PPKn terhadap Pembentukan Sikap Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri 4 Binjai.

1.6.2. Secara Praktis

1.6.2.1. Bagi Guru

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru khususnya guru PPKn untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik, khususnya sikap toleransi.

1.6.2.2. Bagi Peserta Didik

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peserta didik agar peserta didik dapat mencerminkan karakter dan sikap yang baik, khususnya

sikap toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.6.2.3. Bagi Pembaca

Diharapkan para pembaca dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat dari skripsi ini.

